

Dr. Hendri: Hilirisasi Harus Memperkuat Industri Dalam Negeri

Updates. - KORLANTAS.ID

Jul 3, 2026 - 20:45



Dr. Ir. Hendri, ST., MT Wartawan Utama Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)

OPINI - Hilirisasi telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah ingin menghentikan kebiasaan lama mengekspor bahan mentah, kemudian membeli kembali produk jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Melalui hilirisasi, sumber daya alam diharapkan diolah di dalam negeri agar menciptakan nilai tambah, investasi, lapangan kerja, penerimaan negara,

dan kemampuan teknologi.

Arah tersebut sudah tepat. Negara yang kaya sumber daya alam tidak boleh selamanya menjadi pemasok bahan baku bagi industri negara lain. Nikel, bauksit, tembaga, timah, kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, rempah-rempah, hasil perikanan, dan berbagai kekayaan lainnya harus menjadi fondasi pembangunan industri nasional.

Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, kilang, atau fasilitas pengolahan tahap awal. Hilirisasi juga tidak cukup hanya mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi sebelum dikirim ke pasar global.

Hilirisasi harus mengubah posisi Indonesia dalam rantai nilai dunia, bukan hanya mengubah bentuk komoditas yang diekspor.

Jika bijih mineral hanya berubah menjadi logam setengah jadi, sementara mesin, teknologi, komponen, pembiayaan, desain, dan pasar tetap dikuasai pihak asing, Indonesia memang memperoleh nilai tambah lebih besar dibandingkan mengekspor bahan mentah. Akan tetapi, kita belum sepenuhnya membangun kemandirian industri.

Keberhasilan hilirisasi harus diukur dari seberapa besar industri dalam negeri berkembang, berapa banyak pemasok nasional yang tumbuh, sejauh mana teknologi dikuasai, berapa banyak tenaga ahli Indonesia yang tercipta, dan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat di sekitar sumber daya tersebut.

Momentum Besar Hilirisasi Nasional

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa realisasi investasi sektor hilirisasi sepanjang semester pertama 2026 mencapai Rp300,1 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun.

Investasi hilirisasi masih didominasi komoditas mineral, khususnya bauksit, nikel, tembaga, besi dan baja, serta pasir silika. Komposisi tersebut menunjukkan kuatnya peran sumber daya mineral dalam menarik investasi pengolahan di Indonesia. [Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM](#)

Pemerintah juga telah memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis tahap kedua dengan nilai investasi sekitar Rp116 triliun. Proyek tersebut meliputi sektor energi, mineral, dan pertanian, mulai dari kilang bahan bakar, pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether, manufaktur baja, aspal buton, hilirisasi tembaga dan emas, hingga pengolahan minyak sawit, pala, dan kelapa. Keseluruhan proyek tersebut diproyeksikan menciptakan sekitar 19.000 lapangan kerja. [Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM](#)

Perkembangan tersebut berlangsung ketika industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan pertama 2026, industri pengolahan menyumbang sekitar 19,07 persen terhadap produk domestik bruto dan tumbuh 5,04 persen secara tahunan. [Badan Pusat Statistik](#)

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki momentum besar untuk melakukan transformasi ekonomi. Tetapi momentum itu harus dikelola dengan arah yang tepat.

Investasi hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan kawasan pengolahan yang berdiri sebagai pulau ekonomi tersendiri—maju di dalam pagar, tetapi tidak terhubung secara kuat dengan industri dan masyarakat di sekitarnya.

Hilirisasi Bukan Sekadar Smelterisasi

Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menyamakan hilirisasi dengan pembangunan smelter. Padahal, smelter hanyalah salah satu mata rantai dalam proses yang jauh lebih panjang.

Dalam industri nikel, misalnya, pengolahan bijih menjadi feronikel, nickel pig iron, atau produk antara lainnya memang menciptakan nilai tambah. Namun, nilai tambah yang lebih besar berada pada produk lanjutan seperti bahan katoda, sel baterai, sistem penyimpanan energi, kendaraan listrik, perangkat elektronik, teknologi daur ulang, dan berbagai produk akhir lainnya.

Begitu pula dengan tembaga. Hilirisasi tidak cukup berhenti pada katoda tembaga. Indonesia harus mengembangkan industri kabel, komponen elektronik, motor listrik, transformator, peralatan energi, perangkat telekomunikasi, dan berbagai produk berbasis tembaga.

Hilirisasi bauksit tidak boleh hanya menghasilkan alumina atau aluminium dasar. Rantai produksinya harus diteruskan menuju komponen transportasi, konstruksi, kemasan, peralatan rumah tangga, industri dirgantara, dan produk manufaktur bernilai tinggi.

Dalam sektor perkebunan, kelapa sawit tidak cukup diolah menjadi minyak mentah atau bahan bakar. Indonesia perlu memperkuat industri oleokimia, pangan olahan, kosmetik, farmasi, surfaktan, pelumas, biomaterial, dan berbagai turunan lainnya.

Kelapa harus diolah menjadi produk pangan modern, minyak bernilai tinggi, bahan kosmetik, arang aktif, serat, tepung, dan produk kesehatan. Rempah-rempah tidak boleh hanya diekspor dalam bentuk kering, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekstrak, minyak atsiri, oleoresin, produk farmasi, kosmetik, pangan, serta merek dagang global.

Bappenas telah menyusun sejumlah peta jalan hilirisasi komoditas. Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025–2045, misalnya, diarahkan untuk memperkuat produksi, pemasaran, riset, inovasi, dan tata kelola yang inklusif. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa hilirisasi harus dibangun dari hulu hingga pasar akhir, bukan hanya pada satu fasilitas pengolahan. [Kementerian PPN/Bappenas](#)

Ukuran keberhasilan hilirisasi dengan demikian bukan sekadar berapa banyak smelter yang dibangun. Ukurannya adalah seberapa jauh produk Indonesia bergerak menuju bagian rantai nilai yang mempunyai teknologi, keuntungan, dan daya tawar lebih tinggi.

Jangan Sampai Industri Dalam Negeri Hanya Menjadi Penonton

Hilirisasi membutuhkan modal dan teknologi dalam jumlah besar. Karena itu, kehadiran investor asing tetap diperlukan. Perusahaan global dapat membawa pembiayaan, pengalaman, teknologi, akses pasar, dan kemampuan manajemen.

Namun, Indonesia tidak boleh hanya menyediakan bahan baku, lahan, energi, insentif, dan pasar, sementara perusahaan nasional sekadar menjadi penonton.

Setiap investasi hilirisasi harus mempunyai kewajiban membangun keterkaitan dengan industri dalam negeri. Pabrik besar membutuhkan ribuan jenis barang dan jasa: mesin, komponen, suku cadang, perangkat keselamatan, jasa pemeliharaan, konstruksi, logistik, perangkat lunak, makanan, transportasi, pengelolaan limbah, hingga kebutuhan perkantoran.

Kebutuhan tersebut seharusnya menjadi pasar bagi industri nasional, BUMN, koperasi, dan usaha kecil serta menengah. Pemerintah tidak cukup hanya meminta perusahaan menggunakan produk lokal. Negara harus membantu produsen nasional mencapai standar yang dibutuhkan industri besar melalui sertifikasi, pembiayaan, peningkatan teknologi, pelatihan, dan kepastian kontrak.

Perusahaan besar juga harus mempunyai program pengembangan pemasok yang terukur. Industri kecil tidak boleh hanya diundang mengikuti seminar atau dipajang dalam kegiatan seremonial. Mereka harus mendapatkan kesempatan nyata masuk ke dalam rantai pasok.

Kementerian Perindustrian, misalnya, telah mendorong keterlibatan industri kecil dan menengah dalam rantai pasok kendaraan listrik. Langkah tersebut perlu diperluas ke seluruh sektor hilirisasi agar pertumbuhan industri besar memberikan efek pengganda bagi ekonomi nasional. [Kementerian Perindustrian](#)

Tanpa keterkaitan tersebut, hilirisasi hanya akan menciptakan kawasan industri yang bergantung pada mesin, komponen, teknologi, dan jasa dari luar negeri.

Mesin dan Teknologi Harus dikuasai

Salah satu kelemahan struktur industri Indonesia adalah tingginya ketergantungan terhadap mesin dan peralatan produksi impor. Kita dapat mempunyai pabrik dengan tingkat komponen dalam negeri yang cukup tinggi pada produk akhirnya, tetapi mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut masih berasal dari luar negeri. Ketika mesin rusak, suku cadang, perangkat lunak, teknisi, dan pembaruannya juga harus didatangkan dari negara asal.

Ketergantungan seperti ini mengurangi kemandirian dan membuat industri nasional rentan terhadap perubahan nilai tukar, gangguan rantai pasok, pembatasan teknologi, serta ketegangan geopolitik.

Kementerian Perindustrian telah mengakui tantangan tersebut dan mendorong

pengembangan industri pembuat mesin atau *machine making machine*. Indonesia Manufacturing Center di Purwakarta juga disiapkan sebagai pusat pengembangan teknologi, rekayasa manufaktur, dan inovasi mesin industri. [Kementerian Perindustrian](#)

Agenda ini harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari hilirisasi. Setiap proyek strategis perlu mempunyai rencana peningkatan kemampuan teknologi nasional. Perusahaan harus bekerja sama dengan perguruan tinggi, politeknik, lembaga penelitian, dan perusahaan rekayasa Indonesia.

Transfer teknologi tidak boleh hanya menjadi kalimat umum dalam dokumen kerja sama. Harus ada target yang dapat diukur: berapa banyak teknologi yang dipelajari, berapa tenaga ahli Indonesia yang dilatih, berapa komponen yang dapat diproduksi di dalam negeri, berapa paten yang dihasilkan, serta berapa kegiatan penelitian yang dibiayai.

Pemerintah telah menyediakan insentif pengurangan pajak hingga 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta hingga 200 persen untuk pendidikan dan pelatihan. Fasilitas tersebut harus diarahkan pada riset yang benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri. [Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM](#)

Hilirisasi yang hanya mengimpor teknologi akan menghasilkan kegiatan produksi. Namun, hilirisasi yang membangun kemampuan riset dan rekayasa akan melahirkan kekuatan industri.

Nilai Tambah Harus Tinggal di Indonesia

Pemerintah sering menilai keberhasilan hilirisasi dari meningkatnya nilai ekspor. Peningkatan itu penting, tetapi belum cukup. Kita perlu mengetahui berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia setelah dikurangi impor mesin, bahan penolong, pembayaran bunga, biaya lisensi, jasa asing, dan keuntungan yang dibawa keluar negeri.

Sebuah produk dapat tercatat sebagai ekspor Indonesia karena dibuat di wilayah Indonesia. Namun, apabila sebagian besar teknologi, komponen, pembiayaan, dan kepemilikannya berasal dari luar negeri, manfaat bersih bagi perekonomian nasional mungkin tidak sebesar angka ekspornya.

Karena itu, pemerintah membutuhkan neraca nilai tambah domestik untuk setiap sektor hilirisasi strategis. Neraca tersebut harus menunjukkan sumber bahan baku, komponen, energi, teknologi, tenaga kerja, pembiayaan, kepemilikan, pajak, serta distribusi keuntungannya.

Dengan data tersebut, negara dapat membedakan investasi yang benar-benar memperkuat perekonomian nasional dengan investasi yang hanya memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Indonesia.

Insentif fiskal juga harus dikaitkan dengan besarnya nilai tambah domestik. Perusahaan yang membangun industri lanjutan, melatih tenaga kerja, menggunakan pemasok nasional, melakukan riset, dan mengekspor produk akhir

layak memperoleh dukungan lebih besar dibandingkan perusahaan yang hanya melakukan pengolahan dasar.

Hilirisasi Harus Menciptakan Pekerjaan Berkualitas

Nilai investasi yang besar tidak selalu menghasilkan banyak pekerjaan. Sebagian industri pengolahan mineral bersifat padat modal dan menggunakan teknologi otomatis.

Karena itu, hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari jumlah modal yang ditanamkan. Pemerintah harus menilai jumlah serta mutu pekerjaan yang tercipta. Pekerja Indonesia harus memperoleh upah layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan, kepastian hubungan kerja, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan jenjang karier yang jelas.

Posisi teknis dan manajerial juga harus secara bertahap diisi oleh tenaga kerja nasional. Jangan sampai pekerja Indonesia terus berada pada tingkat operasional, sedangkan penguasaan teknologi dan pengambilan keputusan tetap berada di tangan tenaga asing.

Pemerintah perlu menetapkan target nasionalisasi keahlian secara realistis dan bertahap. Perusahaan diberikan waktu untuk melatih tenaga kerja Indonesia, tetapi kemajuannya harus diawasi.

Setiap kecelakaan kerja di kawasan hilirisasi harus menjadi bahan evaluasi serius. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan keselamatan manusia.

Hilirisasi yang berhasil harus membuat pekerja Indonesia naik kelas—dari tenaga operasional menjadi teknisi, insinyur, peneliti, perancang, manajer, dan pemilik usaha.

Daerah Penghasil Tidak Boleh Tetap Miskin

Hilirisasi sering dibangun di wilayah yang kaya sumber daya alam. Pabrik, pelabuhan, jalan, pembangkit listrik, dan kawasan industri tumbuh dengan cepat. Namun, pertumbuhan kawasan belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Harga tanah dan biaya hidup dapat meningkat. Masyarakat kehilangan ruang produksi tradisional. Nelayan menghadapi perubahan wilayah tangkap. Petani kesulitan memperoleh air. Daerah menanggung tekanan lingkungan dan sosial, sementara bagian terbesar keuntungan mengalir ke luar wilayah.

Kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan. Pemerintah harus memastikan daerah penghasil menerima manfaat yang sebanding dengan beban yang ditanggung. Sebagian penerimaan dari sumber daya dan industri perlu dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, transportasi, pelatihan tenaga kerja, serta diversifikasi ekonomi daerah.

Daerah juga membutuhkan dana transformasi ekonomi. Sumber daya alam pada akhirnya akan berkurang. Karena itu, keuntungan yang diperoleh hari ini harus

digunakan untuk membangun sumber ekonomi baru sebelum cadangan habis atau harga komoditas turun.

Hilirisasi tidak boleh menghasilkan kota industri yang modern di balik pagar, sementara desa-desa di sekitarnya tetap tertinggal.

Lingkungan Bukan Harga yang Harus Dikorbankan

Proses hilirisasi membutuhkan energi, air, lahan, dan infrastruktur dalam jumlah besar. Industri pengolahan mineral juga menghasilkan emisi dan limbah yang harus dikelola dengan ketat.

Apabila kerusakan lingkungan, pencemaran, hilangnya mata pencarian, dan biaya kesehatan masyarakat tidak dihitung, nilai tambah yang dibanggakan dapat menjadi semu.

Perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi negara dan masyarakat harus menanggung biaya pemulihan selama puluhan tahun. Karena itu, setiap proyek harus memenuhi kajian lingkungan yang kredibel, transparan, dan melibatkan masyarakat. Pengawasan tidak boleh berhenti setelah izin diterbitkan. Data emisi, kualitas air, pengelolaan limbah, keselamatan, serta pemulihan lahan harus tersedia bagi publik.

Penggunaan energi bersih juga harus menjadi bagian dari strategi hilirisasi. Produk yang diproses menggunakan energi beremisi tinggi akan menghadapi tekanan semakin besar di pasar global. Konsumen dan negara tujuan ekspor mulai memperhatikan jejak karbon suatu produk.

Indonesia tidak boleh hanya menghasilkan produk hilir. Kita harus menghasilkan produk hilir yang bersih, efisien, dapat ditelusuri, dan memenuhi standar keberlanjutan internasional.

Kepatuhan lingkungan bukan hambatan bagi industri. Ia merupakan syarat agar industri dapat bertahan dalam jangka panjang.

Hilirisasi Tidak Boleh Hanya Berbasis Mineral

Selama ini, pembicaraan mengenai hilirisasi terlalu banyak berpusat pada nikel dan mineral lainnya. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan.

Hilirisasi sektor-sektor tersebut berpotensi menciptakan pekerjaan lebih luas karena melibatkan petani, nelayan, koperasi, industri kecil, dan masyarakat perdesaan.

Kakao dapat diolah menjadi coklat, bahan kosmetik, dan produk kesehatan. Rumput laut dapat dikembangkan menjadi pangan, farmasi, bioplastik, dan bahan industri. Ikan tidak hanya dijual dalam keadaan segar, tetapi diolah menjadi produk makanan, minyak ikan, kolagen, dan bahan farmasi. Kayu dapat dikembangkan menjadi furnitur bermerek, material bangunan modern, dan produk rekayasa.

Hilirisasi pertanian harus dimulai dari peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Jangan sampai pabrik pengolahan berkembang, tetapi petani tetap menghadapi bibit buruk, produktivitas rendah, harga tidak stabil, dan posisi tawar yang lemah.

Bappenas, misalnya, menempatkan peremajaan tanaman sebagai fondasi penting dalam Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045. Pendekatan ini penting karena industri hilir tidak akan kuat tanpa hulu yang produktif dan berkelanjutan. [Kementerian PPN/Bappenas](#)

Hilirisasi harus menghubungkan petani dan nelayan dengan industri, teknologi, pembiayaan, serta pasar. Bukan memisahkan mereka dari rantai nilai yang dibangun.

Amanat Konstitusi untuk Kemakmuran Rakyat

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (4) juga mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. [JDIH DPR RI](#)

Kata “sebesar-besarnya” berarti negara harus mengupayakan manfaat optimal dari sumber daya alam. Menjual bahan mentah dengan nilai rendah jelas tidak memenuhi semangat tersebut. Namun, membangun industri pengolahan yang manfaatnya terkonsentrasi pada segelintir perusahaan juga belum cukup.

Kemakmuran harus dirasakan pekerja, petani, nelayan, pengusaha nasional, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan landasan untuk membangun struktur industri nasional yang mandiri, sehat, kuat, berdaya saing, dan berkeadilan. [Peraturan.go.id](#)

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 menempatkan transformasi ekonomi dan industrialisasi sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. [Peraturan.go.id](#)

Dengan demikian, hilirisasi bukan sekadar kebijakan perdagangan atau investasi. Hilirisasi merupakan instrumen konstitusional untuk membangun kemandirian dan kemakmuran nasional.

Membangun Peta Jalan yang Utuh

Indonesia membutuhkan peta jalan hilirisasi yang lebih terperinci untuk setiap komoditas strategis. Peta tersebut tidak boleh hanya mencantumkan nilai

investasi dan lokasi proyek.

Pemerintah harus menetapkan pohon industri yang menunjukkan tahapan pengolahan dari bahan baku hingga produk akhir. Untuk setiap tahapan harus ditentukan kemampuan nasional saat ini, teknologi yang belum dikuasai, kebutuhan investasi, pasar potensial, kebutuhan tenaga kerja, pemasok lokal, risiko lingkungan, dan target waktu pengembangannya.

Peta jalan juga harus menjawab pertanyaan penting: produk apa yang akan dihasilkan, siapa yang akan membelinya, berapa besar permintaannya, bagaimana posisi Indonesia terhadap pesaing, dan apakah kapasitas produksi yang dibangun dapat diserap pasar.

Tanpa perencanaan permintaan, hilirisasi berisiko menciptakan kelebihan produksi. Harga produk turun, pabrik mengurangi kegiatan, dan perusahaan meminta bantuan baru kepada pemerintah.

Negara tidak boleh membangun industri hanya berdasarkan ketersediaan bahan baku. Industri harus dikembangkan berdasarkan kombinasi sumber daya, teknologi, pasar, kemampuan manusia, serta kepentingan strategis nasional.

Ukuran Keberhasilan Harus Diperbarui

Keberhasilan hilirisasi selama ini sering diumumkan melalui empat angka: nilai investasi, jumlah proyek, nilai ekspor, dan jumlah tenaga kerja. Indikator tersebut penting, tetapi belum cukup.

Pemerintah perlu menambahkan ukuran lain, antara lain:

- Persentase nilai tambah yang tinggal di Indonesia.
- Kedalaman pengolahan hingga produk akhir.
- Jumlah dan nilai kontrak pemasok nasional.
- Tingkat penggunaan mesin dan komponen produksi dalam negeri.
- Jumlah tenaga ahli Indonesia pada posisi teknis dan manajerial.
- Investasi perusahaan dalam penelitian dan pengembangan.
- Paten, desain, dan teknologi yang dimiliki entitas Indonesia.
- Kualitas pekerjaan, tingkat upah, dan keselamatan tenaga kerja.

- Peningkatan pendapatan masyarakat serta daerah penghasil.
- Besarnya kontribusi industri terhadap substitusi impor.
- Diversifikasi pasar ekspor dan produk.
- Penggunaan energi bersih serta pengurangan emisi.
- Pemulihan lingkungan dan pengelolaan limbah.
- Keterlibatan koperasi, UMKM, petani, dan nelayan.

Data tersebut perlu diumumkan secara terbuka dalam sebuah dasbor hilirisasi nasional. Publik berhak mengetahui apakah fasilitas negara benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding.

Transparansi juga akan membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan. Proyek yang berhasil dapat diperluas, sedangkan proyek yang tidak memberikan dampak cukup besar harus diperbaiki.

Bukan Menutup Diri dari Dunia

Ada pihak yang berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu menguasai seluruh rantai produksi karena dalam perdagangan global setiap negara melakukan spesialisasi. Pandangan tersebut ada benarnya.

Indonesia tidak harus membuat setiap mesin, komponen, dan teknologi sendiri. Upaya mencapai kemandirian absolut akan membutuhkan biaya sangat besar dan dapat menghasilkan industri tidak efisien.

Namun, spesialisasi tidak boleh menjadi alasan untuk menerima ketergantungan permanen. Indonesia harus memilih bagian rantai nilai yang strategis, sesuai dengan sumber daya dan kemampuan nasional, mempunyai pasar, serta memberikan dampak besar terhadap teknologi dan pekerjaan.

Pada bagian tertentu, kita dapat bekerja sama dengan perusahaan global. Pada bagian lain, negara harus membangun kemampuan sendiri karena menyangkut ketahanan ekonomi, energi, pangan, kesehatan, pertahanan, dan teknologi masa depan.

Tujuannya bukan menutup diri, melainkan memperkuat posisi tawar. Kerja sama akan lebih seimbang apabila Indonesia datang sebagai bangsa yang mempunyai kemampuan, bukan hanya sebagai pemilik bahan mentah dan pasar.

Dari Nilai Tambah Menuju Kedaulatan Industri

Hilirisasi merupakan kesempatan besar untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia. Kebijakan ini dapat mengakhiri pola kolonial yang menempatkan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi industri negara lain.

Namun, kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan dengan pendekatan yang terlalu sempit. Hilirisasi tidak cukup hanya menaikkan nilai ekspor. Ia harus memperkuat industri dalam negeri, menciptakan pemasok nasional, mengembangkan teknologi, meningkatkan keterampilan pekerja, memperluas kepemilikan Indonesia, dan menyejahterakan daerah penghasil.

Smelter adalah awal, bukan akhir. Pabrik pengolahan adalah pintu masuk, bukan tujuan terakhir. Tujuan sesungguhnya adalah terbentuknya ekosistem industri nasional yang lengkap, produktif, inovatif, mandiri, dan berkelanjutan.

Setiap ton sumber daya yang diambil dari bumi Indonesia harus meninggalkan kemampuan baru bagi bangsa. Setiap investasi harus melahirkan pengetahuan. Setiap pabrik harus menumbuhkan pemasok lokal. Setiap peningkatan produktivitas harus memperbaiki kesejahteraan pekerja. Setiap keuntungan hari ini harus digunakan untuk mempersiapkan ekonomi setelah sumber daya alam berkurang.

Jika hilirisasi hanya mengubah bijih menjadi produk setengah jadi, sementara teknologi, mesin, keuntungan, dan kendali industri tetap berada di luar negeri, kita baru berpindah satu langkah dalam rantai produksi.

Indonesia harus bergerak lebih jauh. Hilirisasi harus menjadi jembatan dari kekayaan sumber daya menuju penguasaan teknologi, dari ketergantungan menuju kemandirian, dan dari pertumbuhan ekonomi menuju kemakmuran rakyat.

Hanya dengan cara itulah hilirisasi benar-benar memperkuat industri dalam negeri dan menjadi fondasi Indonesia sebagai negara industri yang berdaulat.

Jakarta, 3 Juli 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Wartawan Utama

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)